

BAB II
NEGARA DALAM KONSEP POLITIK KI BAGUS
HADIKUSUMO

A. Pengertian Politik dan Gerakan Politik Menurut Ki Bagus Hadikusumo

Pengertian politik menurut Ki Bagus Hadikusumo ialah sebagai cara untuk mengatur dan memerintah sebuah Negara atau seni mengelola masyarakat melalui berbagai keputusan dan tindakan demi tercapainya cita-cita ideologi Negara karena Negara adalah kurnia Allah yang dilimpahkan kepada sebuah bangsa yang memiliki sifat Juhuriyah demi menjamin berlakunya syari'at Islam.¹

Asal usul dan pertumbuhan gerakan Islam di Indonesia didominasi dengan gerakan politik. Gerakan politik di kalangan Muslimin di Indonesia dapat dikatakan identik dengan asal usul dan pertumbuhan Sarekat Islam. Sebuah partai Islam lain, Persatuan Muslimin Indonesia di daerah Sumatera aktif sebagai

¹ Irfan S.Awwas Trilogi, *Kepemimpinan Negara Islam Indonesia* (Yogyakarta:Uswah,2008),p.123.

suatu partai politik dalam permulaan tahun 1930-an. Tetapi setelah itu Partai Persatuan Muslimin Indonesia lumpuh karena tindakan yang dilakukan pihak Belanda. Partai Persatuan Muslimin Indonesia yang didirikan pada tahun 1937 memperlihatkan harapan-harapan besar, tetapi ini tidak dapat dipenuhi karena datangnya Jepang pada tahun 1942. Karena kesempatan tumbuh dari partai-partai lain ini sangat kurang, terbukalah kemungkinan untuk mempelajari aspek politik dari gerakan pembaharuan Islam dari perkembangan Serikat Islam. Perkembangan Partai Persatuan Muslimin Indonesia memperlihatkan maju dan mundurnya posisi umat Islam di Indonesia yang mendasarkan ideologinya pada ajaran Islam.²

Perkembangan Sarekat Islam dapat dibagi menjadi empat bagian: Periode pertama (1911-1916) yang memberikan corak dan bentuk bagi Partai Persatuan Muslimin Indonesia, Periode kedua (1916-1921) yang dapat dikatakan merupakan periode puncak, Periode ketiga (1921-1927) yang merupakan periode konsolidasi yang mana Partai Persatuan Muslimin Indonesia

² Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia* (Jakarta: LP3ES), p. 114.

bersaingan keras dengan golongan Komunis, di samping itu juga mengalami tekanan-tekanan yang dilancarkan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Dan keempat (1927-1942) yang memperlihatkan usaha Partai Persatuan Muslimin Indonesia untuk tetap mempertahankan eksistensinya di forum politik Indonesia.

Pada tahun 1922 gerakan nasional keseluruhan Sarekat Islam tidak lagi menempati posisi yang menentukan sebagai yang pernah ditempatinya. Di samping menurunnya kekuatan Partai Persatuan Muslimin Indonesia hal ini mungkin disebabkan oleh perubahan hubungannya dengan partai-partai lain yang tidak bersahabat lagi seperti pada periode sebelumnya. Menurut Deliar Noer peranan Sarekat Islam sebagai suatu perkembangan yang wajar. Pertama, tidaklah dapat diharapkan bahwa sebuah partai Islam hanya menjadi penonton tentang problema yang bersangkutan dengan orang Islam pada umumnya. Kedua, walaupun Partai Sarekat Islam mempunyai pemikiran pembaharuan dalam agama, Partai Sarekat Islam kurang terlibat dalam masalah-masalah yang dipertikaikan antara pihak

pembaharu (Kaum Muda) dan pihak tradisi (Kaum Tua), dibandingkan dengan orang-orang ataupun organisasi-organisasi yang membatasi diri mereka pada bidang sosial dan pendidikan. Ketiga, walaupun dalam masa mundurnya Sarekat Islam masih mempunyai pengikut-pengikut yang lebih banyak dari organisasi Islam manapun pada waktu itu.³

Partai Sarekat Islam memang dianggap sebagai satu-satunya partai bagi semua orang islam, baik pembaharu maupun golongan tradisi. Kongres-kongres Al Islam juga membicarakan masalah-masalah politik seperti masalah *khilafah*. Tiga organisasi Islam yang berpartisipasi dalam kongres Al Islam tahun 1922 adalah Sarekat Islam, Muhammadiyah dan Al Irsyad. Pada saat itu pembahasan kongres Al Islam membicarakan masalah-masalah agama, di mana Muhammadiyah dan Al Irsyad di satu pihak dan golongan tradisi di pihak lain mempunyai perbedaan pendapat.

Akhirnya kongres memilih Serikat Islam sebagai pimpinan. Perbedaan antara kalangan tradisi dan kalangan

³ George McT. Kahin. *Nasionalisme and Revolution in Indonesia* (Ithaca, N. Y. : Cornell University Press, 1952), p.72

pembaharu. Suatu pertikaian terjadi antara Sarekat Islam dan Muhammadiyah pada tahun 1926 yang menyebabkan pihak Sarekat Islam mengambil langkah-langkah disiplin terhadap Muhammadiyah (yaitu bahwa anggota Muhammadiyah akan dikeluarkan dari partai atau bila mereka menghendaki tetap di dalam Partai, mereka harus meninggalkan Muhammadiyah). Pada masa ini juga Sarekat Islam berusaha untuk memonopoli persoalan *khilafah* dengan menganggap diri sebagai satu-satunya wakil pihak Islam Indonesia dengan mengubah Majelis A'la Islam Syarqiyah sebagai bagian dari Partai. Peranan Partai Sarekat Islam dalam masalah khilafah habis begitu saja disebabkan oleh berkurangnya perhatian negeri-negeri Islam lain tentang masalah ini.⁴

Dalam tahun 1927 periode transisi untuk mendirikan Partai Serikat Islam dan menghapuskan struktur lama selesai. Pada tahun 1927 pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) oleh Soekarno dan. Dengan demikian di Indonesia dimulailah partai yang menentang kedudukan Sarekat Islam ataupun

⁴ George McT. Kahin. *Nasionalisme and Revolution in Indonesia* (Ithaca, N. Y. : Cornell University Press, 1952), p.75

kepemimpinan Islam umumnya dalam rangka pergerakan perjuangan kemerdekaan. Posisi yang penting dari pemimpin-pemimpin PNI di dalam gerakan kemerdekaan menyebabkan terjadinya dua sayap di dalam lingkungan gerakan, yaitu Nasionalis Islam di satu pihak dan Nasionalis yang netral Agama di pihak lain. Secara ideologi adanya kedua sayap ini dapat berkembang sampai masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942, bahkan sampai masa kemerdekaan.

Pada tahun 1930 nama Sarekat Islam berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia. Sarekat Islam pecah menjadi beberapa partai kecil, seperti Penyadar dan Komite Kebenaran PSII. Pada tahun ini juga Sarekat Islam mulai melemah dikarenakan terjadi perselisihan antar anggota-anggotanya dan persaingan dengan kelompok-kelompok seperti Penyadar dan Komite Kebenaran, serta berdirinya Partai Islam Indonesia dalam tahun 1937. Kedudukan yang melemah ini dicerminkan juga pada peranan partai dalam gerakan nasional umumnya di Indonesia. Sedangkan dalam bidang agama Partai Sarikat Islam

terus aktif akan tetapi tidak dapat mempertahankan kepemimpinannya seperti sebelumnya.⁵

Adanya tindakan-tindakan disiplin Sarekat Islam terhadap Muhammadiyah dalam tahun 1927, berdirinya Nahdlatul Ulama tahun 1926 dan ketegangan dengan pihak Persatuan Islam sekitar tahun 1930-an mengenai masalah *furu'* tampaknya mengasingkan Partai Sarekat Islam dari organisasi-organisasi Islam lain. Setelah partai Sarekat Islam berakhir dengan tumbuhnya Penyadar (dipimpin oleh Salim) dan Komite Kebenaran (dipimpin Kartosuwirjo), terdapat dua lagi partai Islam yaitu Persatuan Muslimin Indonesia dan Partai Islam Indonesia.

Dalam politik sebenarnya pihak Islam memulai gerakannya dengan sedikitnya menaruh kepercayaan terhadap pihak Belanda yang melancarkan politik etis, tetapi lambat laun kepercayaan itu hilang dikarenakan beberapa kekecewaan. Kekecewaan ini antara lain. Pertama : disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari pejabat Belanda untuk menghambat dan

⁵ George McT. Kahin. *Nasionalisme and Revolution in Indonesia* (Ithaca, N. Y. : Cornell University Press, 1952), p.85

memukul gerakan moderen Islam. Kedua : kedudukan kepala-kepala anak negeri tradisional seperti priyayi dan kepala adat dilindungi oleh pemerintah. Kepala-kepala anak negeri ini memandang para pemimpin moderen Islam sebagai lawan. Ketiga : Kekecewaan terbesar yang dirasakan oleh kalangan moderen Islam terutama yang bergerak di bidang politik ialah penolakan Belanda untuk mendirikan suatu pemerintahan yang bertanggungjawab kepada lembaga-lembaga perwakilan.⁶

Munculnya pemikiran nasional di kalangan para pembaharu di Indonesia tidak mengurangi perasaan kesatuan umat Islam. Sese kali konferensi Islam di Timur Tengah turut memperkuat. Tetapi tidaklah tercetus dalam pikiran kalangan modern bahwa struktur politik selain *khilafah* tidak sesuai dengan Islam. Menurut kalangan moderen, Islam sesuai saja dengan nasionalisme dan dalam banyak hal memupuk perasaan kebangsaan ini.

Di sisi lain, pada saat akhir pendudukan Jepang yaitu sewaktu Jepang kalah dengan Sekutu, Indonesia memperoleh

⁶ George McT. Kahin. *Nasionalisme and Revolution in Indonesia* (Ihaca, N. Y. : Cornell University Press, 1952), p.91

manfaat dengan diijinkannya untuk mengadakan persiapan kemerdekaan Indonesia. “Orang-orang Jepang memandang Islam sebagai salah satu sarana yang terpenting untuk menyusupi lubuk rohaniyah terdalam dari kehidupan rakyat Indonesia dan untuk meresapkan pengaruh pikiran serta cita-cita mereka ke bagian masyarakat yang paling bawah.⁷ Beberapa catatan-catatan yang termuat dalam buku riwayat hidup serta himpunan tulisan K. H. Wahid Hasjim⁸ memuat manfaat zaman Jepang, yaitu dibentuknya Kantor Urusan Agama Indonesia, didirikan Masyumi, dan pembentukan Hizbullah.

Kantor Urusan Agama (dalam bahasa Jepang *Shumubu*) mengganti *Kantoor voor het Inlandsche Zaken* yang sudah ada pada zaman kolonial Belanda. Sebelumnya Kantor Urusan Agama dipimpin oleh Kolonel Hori dari tentara Jepang mulai bulan Maret 1942, tetapi pada tanggal 1 Oktober 1943 jabatan itu diserahkan kepada Hoesein Djajadiningrat. Namun, lebih penting

⁷ M. A Aziz, *Japan 's Colonialism and Indonesia*, tesis, Leiden 1955, p.200.

⁸ *Sedjarah Hidup . A Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar*, disunting oleh Aboe Bakar atas permintaan Menteri Agama bertanggal 23 Maret 1954, untuk mengenang pendahulunya yang meninggal dalam kecelakaan mobil pada tanggal 9 April 1953; diterbitkan di Jakarta. 1954; selanjutnya kita sebut sebagai Wahid Hasjim.

dari itu adalah penunjukan pejabat kepala yang baru sejak tanggal 1 Agustus 1944. Pimpinan baru ialah K. Hasjim Asj'ari. Manfaat kedua dari zaman Jepang adalah pembentukan Masyumi, yang merupakan singkatan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Masyumi dipandang sebagai pengganti Majelis Islam A'la Indonesia. Posisi kepemimpinan dari Masyumi yang baru itu agak terbagi rata di antara para pendukung pikiran-pikiran Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.⁹

Dengan pembentukan dua organisasi ini yaitu kantor Urusan Agama dan Masyumi, berarti dalam kenyataannya umat Islam telah diberi suatu aparatur yang akan menjadi sangat penting bagi masa depan. Sebagai suatu sistem keagamaan, Islam telah menerima suatu sarana yang kemudian dapat berkembang menjadi suatu Kementrian Agama -yang dibentuk selama Kabinet Sjahrir 2 Maret 1946- dengan jaringan kantor-kantor daerahnya di seluruh Indonesia. Dan sebagai kekuatan politik, yang sayapnya dipatahkan selama zaman kolonial, Islam mampu memainkan peranannya melalui Masyumi yang pada

⁹ Lihat Wahid Hasjim, P. 351-352.

tanggal 7 November 1945 direorganisasikan sebagai suatu partai politik.¹⁰

Manfaat ketiga yang diperoleh selama zaman Jepang pada akhir tahun 1944 adalah disusunnya Hizbullah yang merupakan sejenis organisasi militer bagi pemuda-pemuda Muslim. Para pemimpin Islam sangat mengharapkan terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Pendudukan Jepang telah mengakhiri abad-abad gelap penindasan Kolonial Belanda. Pemerintahan Jepang memberikan suatu janji yang samar-samar mengenai kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Pada tanggal 1 Maret 1945 janji itu diulangi secara terbuka. Sebagai suatu reaksi terhadap pengumuman (Perdana Menteri Jepang) Koiso tanggal 7 September 1944, para pemimpin Masyumi mengundang anggota-anggotanya dalam rangka persiapan untuk membebaskan Negeri dan Agamanya. Salah satu hasilnya adalah pembentukan Hizbullah.

Deklarasi Hizbullah pada tanggal 1 Maret 1945 menghasilkan terbentuknya suatu panitia untuk menyelidiki apa

¹⁰ Menurut A. A Zorab, *De Japanse Bezetting van Indoneie*, tesis, Leiden, (1954), p. 107.

yang harus dikerjakan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Panitia itu diresmikan di Jakarta tanggal 29 April yang disebut Badan dengan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Dr. Radjiman Widjodiningrat yang beranggotakan 62 orang sehingga disebut sebagai “Panitia 62”.¹¹ Kalangan Islam yang ikut beraspirasi hanya 15 orang yaitu:

1. Abikusno Tjokrosujoso (Syarekat Islam)
2. K. H. Ahmad Sanusi (Persatuan Umat Islam, Sukabumi)
3. K. H Abdul Halim (Perikatan Umat Islam, Majalengka)
4. Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah)
5. K. H Masjkur (Nahdlatul Ulama)
6. K. H Abdul Kahar Muzakkir (Muhammadiyah)
7. K. H Mas Mansur (Muhammadiyah)
8. Raden Rooslan Wongsokusumo (bekas anggota Perindra yang bergabung ke Masjumi tahun 1945)
9. H. Agus Salim (Penyadar)
10. Raden Syamsuddin (bekas Perindra, dari PUI)

¹¹ B. J Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970* (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), p. 18-19.

11. Dr. Soekiman Wirjosandjojo (Partai Islam Indonesia)
12. K. H Abdul Wahid Hasjim (Nahdlatul Ulama)
13. Ny. Sunarjo Mangunpuspito (Aisyiah, bekas aktifis *Jong Islamieten Bond*)
14. Abdul Rahman Baswedan (bekas Partai Arab Indonesia)
15. Abdul Rahim Pratalykrama (residen Kediri, afiliasi tidak diketahui)

Pada tanggal 28 Juli 1945 anggota BPUPKI 28 orang, hanya dua orang yang dapat dikatakan termasuk golongan Islam, yaitu Pangeran Mohammad Noor (bekas JIB “Jong Islamieten Bond” yang bergabung ke Masjumi tahun 1945), dan H. Abdul Fatah Hassan. Meskipun hanya 15 orang dari keseluruhan anggota BPUPKI akan tetapi tokoh-tokoh dari kalangan Islam cukup memberi warna terhadap perumusan dasar dan konstitusi dari Negara Indonesia yang akan dibentuk.¹²

Sidang pertama panitia BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945, hanya mempunyai satu acara, yaitu pembentukan tentang Dasar Negara Indonesia. Moh. Yamin

¹² Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), p. 31.

menyampaikan sebuah pidato yang merupakan rancangan falsafah negara Indonesia yang dirangkum dalam lima sila yaitu Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat, Keadilan Sosial. Terdapat perbedaan pendapat mengenai lima sila falsafah negara. Inti dari masalah yang diajukan adalah persoalan struktur negara (negara kesatuan atau negara federal), persoalan hubungan antara negara dan agama, dan persoalan apakah Indonesia menjadi republik atau kerajaan. Pada hari terakhir masa sidang ini, tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan suatu pidatonya, yang kemudian diterbitkan dengan judul *Lahirnya Pantja Sila*.¹³

B. Kedudukan Negara Menurut Ki Bagus Hadikusumo

Negara adalah suatu “Institution” yang mempunyai hak, tugas dan tujuan yang khusus. Institution dalam pengertian umum adalah suatu badan dan organisasi yang mempunyai tujuan khusus serta dilengkapi oleh alat-alat material dan peraturan-peraturan tersendiri dan diakui oleh umum. Sebagai

¹³ Yamin. *Naskah*, I, hlm. 61-81. Suatu ringkasan berdasarkan terjemahan bahasa Inggris oleh Kementerian Penerangan Indonesia (*The Birth of Pantjasila*, Jakarta. 1950) dapat ditemukan dalam Kahin, *Nationalism*, hlm. 122-127.

contoh adalah Institution perkawinan. Pada waktu melakukan perkawinan, diperlukan perlengkapan dan kepanitiaan untuk melaksanakan perkawinan. Selain itu juga diperlukan alat-alat material seperti gedung, masjid, alat-alat administrasi, dan lain-lain.¹⁴

Ki Bagus Hadikusumo membagi model politik di Indonesia dalam kaitannya relasi agama dan negara menjadi 3 model yaitu:

1. Model Negara Demokrasi Islam

Model Negara Demokrasi Islam ini mencita-citakan sebuah negara Islam, dengan cara memasukkan Islam ke dalam negara melalui proses demokrasi. Hubungan agama dan negara dalam Model Negara Demokrasi Islam ini bahwa negara mempunyai peran menentukan dalam kehidupan agama rakyat. Kelemahan Model Negara Demokrasi Islam ini adalah tidak bisa

¹⁴ Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara* (Bandung : Segarsy, 2014), p. 48

diterapkan dalam masyarakat Indonesia Indonesia yang pluralistik.¹⁵

2. Model Negara Demokrasi Agama

Model Negara Demokrasi Agama Merupakan hasil pemikiran para generasi baru muslim yang hadir dalam panggung politik awal 1970-an. Secara genealogis, generasi itu datang dari lingkungan santri yang sebagian besarnya adalah keturunan dan kerabat para generasi proklamasi, baik Masyumi maupun Nahdatul Ulama.

Tidak seperti generasi dalam model pertama, generasi baru ini kurang *concern* dengan afiliasi ideologi. Model kedua ini negara bersikap netral terhadap agama, tetapi menganggap pentingnya peran agama dalam negara. Dalam soal hubungan agama dan negara generasi baru santri ini kemudian terbelah menjadi dua kelompok.

Yang pertama, cenderung menganggap pentingnya peran

¹⁵ Muhammad Hisyam adalah peneliti pada Pusat penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB)-LIPI . Dalam jurnal *Ki Bagoes Hadikoesoemo Hadikusumo dan Problem Relasi Agama-Negara* dalam Jurnal *Masyarakat dan Budaya*, Volume 13, No. 2 tahun 2011.

agama dan negara. Kedua, yang melihat hubungan itu tidak begitu penting.¹⁶

3. Model Negara Demokrasi Liberal

Model Negara demokrasi Libereal Muncul sebagai reaksi terhadap banyaknya masalah hubungan agama dan negara yang muncul pada model kedua. Kritik yang keras disebabkan oleh posisi hegemonik negara atas aktivitas agama rakyat, dan mencoba mencari format baru hubungan agama dan negara yang lebih layak. Seperti Model kedua, Model ketiga juga berangkat dari kesadaran sosiologis tentang realitas pluralistik rakyat Indonesia untuk menemukan integritas nasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip pluralisme.

Jika Model kedua prinsip pluralisme berada pada kesadaran agama dan pentingnya peran negara dalam memelihara agama rakyatnya, sementara mereka menolak sekularisme, maka Model ketiga prinsip

¹⁶ Muhammad Hisyam, Jurnal *Mayarakat dan Budaya* . Volume 13. No. 2. (2011), p. 20.

pluralisme diletakkan pada pemisahan peran agama dan negara. Pluralisme tidak akan jalan jika negara terlampau intervensi pada aktivitas agama rakyatnya.¹⁷

Pemikiran tentang Negara Demokrasi Liberal di Indonesia tumbuh pesat setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Perubahan rezim mengakibatkan makin liberalnya iklim politik, dimana kebebasan berpendapat dan berbicara menjadi semakin normal, mengkritik peran hegemonik negara atas masalah-masalah agama dan menghimbau kaum muslimin untuk tidak menyerahkan urusan agama kepada pemerintah. Ada dua alasan mengapa terjadinya situasi ini.

Pertama, sebagai bagian dari ketidak-puasan atas sistem politik dan ekonomi, pelaksanaan hukum serta peran negara atas agama yang telah dibangun oleh pemerintahan Soeharto.

¹⁷ Muhammad Hisyam, *Jurnal Masyarakat dan Budaya* . Volume 13. No. 2. (2011), p. 22.

Kedua sebagai respons terhadap munculnya kelompok fundamentalis Islam, yang agendanya adalah membawa Islam ke dalam negara, tuntutan memulihkan Jakarta Charter, dan kritik atas RUU yang esensinya mendorong intervensi negara atas kehidupan beragama kaum muslimin.

Dalam konteks perkembangan pemikiran politik Islam seperti itu, Ki Bagus Hadikusumo sebagai eksponen “angkatan 45” tidak dapat dipisahkan dari karakter model pertama yang memandang pentingnya negara mengatur pelaksanaan agama. Tetapi pemikiran semacam ini bukan sesuatu yang tidak bisa ditawarkan.

Ki Bagus Hadikusumo berhadapan dengan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta, yang dianggap oleh banyak kalangan Islam sebagai dasar konstitusional bagi pelaksanaan syariat Islam, Ki Bagus Hadikusumo justru tidak sepaham. Ki Bagus Hadikusumo berpendirian bahwa negara tidak boleh campur tangan atau mengatur dalam urusan agama. Pendirian semacam ini sejalan

dengan pemikiran model ketiga. Oleh karena itu, pemikiran Ki Bagus Hadikusumo menerabas jauh ke depan mendahului jamannya.¹⁸

Sebagai salah satu tokoh Islam, Ki Bagus Hadikusumo memiliki integritas cita-cita yang tinggi dan luhur untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia. Ki Bagus Hadikusumo memperjuangkan hukum dan ajaran Islam di dalam negara Indonesia melalui forum Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bersama tokoh-tokoh Islam lainnya.

Dalam pidatonya pada sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 Ki Bagoes Hadikoesoemo menyerukan agar persatuan nasional dan membangun negara Indonesia diatas ajaran Islam.¹⁹

¹⁸ Muhammad Hisyam, *Jurnal Masyarakat dan Budaya* . Volume 13. No. 2. (2011), p. 25.

¹⁹ Ki Bagoes Hadikoesoemo, *Islam Sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin* (Yogyakarta: Pustaka Rahayu, 1954), p. 7.

C. Hubungan Negara Dan Agama Menurut Ki Bagus

Hadikusumo

Konsep hubungan agama dan negara telah menjadi materi perdebatan antara golongan nasionalis Islam dan nasionalis netral agama sejak tahun 1920-an. Kalangan Islam mencita-citakan Indonesia merdeka berdasarkan persatuan yang diciptakan oleh adanya solidaritas Islam yang dianut 90% penduduk Hindia-Belanda. Sedangkan kaum kebangsaan mengatakan persatuan itu didasarkan atas cinta tanah air. Karena itu sudah selayaknya jika golongan Islam mempunyai cita-cita Indonesia merdeka didasarkan atas Islam, sedangkan kaum kebangsaan pada cinta tanah air.

Perdebatan tentang hubungan agama dan negara kembali muncul dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya. Inti permasalahannya adalah Kalangan Islam berpegang teguh bahwa Islam adalah agama yang mengandung ideologi negara dan karena itu tidak mungkin agama dipisahkan dengan negara. Sedangkan kaum kebangsaan beranggapan bahwa antara agama dan negara itu harus dipisahkan sebab jika

disatukan berarti mendirikan negara Indonesia bukan karena persatuan.

Bentuk pernyataan enam kali dalam bentuk perintah, harapan, atau anjuran, dan dua kali dalam bentuk pernyataan, yaitu sebagai berikut:

1. Islam itu cakap dan cukup serta pantas dan patut untuk menjadi sendi pemerintahan kebangsaan di negara kita Indonesia ini.
2. Umat Islam adalah umat yang mempunyai cita-cita yang luhur dan mulia sejak dahulu hingga sekarang, seterusnya pada masa yang akan datang, yaitu dimana ada kemungkinan dan kesempatan pastilah umat Islam akan membangunkan negara atau menyusun masyarakat yang didasarkan atas hukum Allah dan agama Islam.²⁰

Secara filosofis Ki Bagus Hadikusumo mengemukakan tentang adanya adanya persatuan antara orang dan tempatnya, antara bangsa Indonesia dan tanah airnya. Sehingga dengan

²⁰ Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), p.101-102.

demikian bangsa Indonesia dituntut untuk mewujudkan persatuan nasional Indonesia. Ki Bagus Hadikusumo mendasarkan keinginannya agar Islam dijadikan dasar negara pada pemahaman atas ajaran Islam secara substansial dan menyeluruh. Bagi Ki Bagus Hadikusumo, substansial dan sistematika ajaran Islam meliputi: iman, ibadah, amal shaleh, dan jihad. Keempat aspek ajaran ini merupakan ringkasan ajaran Islam yang telah diajarkan dan dipimpinkan oleh para Nabiullah dalam rangka memperbaiki masyarakat atau negara.²¹

Lima tahun kemudian, ringkasan ajaran Islam yang telah disampaikan dalam forum sidang BPUPKI (1945) ini juga disampaikan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-31 (1950), dengan penambahan dua aspek ajaran, yaitu meneladani pada para Nabiullah, terutama Nabi Muhammad SAW, dan berorganisasi (bernegara). Keduanya merupakan kiat strategi perjuangan yang tidak bisa ditawar dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam.

²¹ Ki Bagoes Hadikoesoemo, *Islam Sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin*. (Yogyakarta: Pustaka Rahayu. 1954), p. 5-7.

Dalam sidang BPUPKI terjadi perdebatan ideologis yang sengit antara golongan Islam dengan golongan nasional sekuler tentang dasar negara yang akan diberlakukan di Indonesia. Hal ini diakui oleh Soepomo dalam pidatonya di depan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945.²²

Gagasan-gagasan para tokoh Islam menjadikan Islam dasar negara sebenarnya tidak dilengkapi oleh argumentasi empiris mengenai “negara Islam” yang dicita-citakan. Dipandang dari sudut ini, sebenarnya yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Islam dalam BPUPKI dan PPKI bukan realisasi konsep negara Islam tetapi lebih tepat pada adanya jaminan terhadap pelaksanaan syariat ajaran-ajaran Islam.

Ki Bagus Hadikusumo mendasarkan pemikirannya pada Al Quran dan Sunnah. Al Quran banyak berbicara tentang masalah politik, sosial, urusan duniawi dan lain-lain. Pemisahan Islam dengan negara bagi Ki Bagus Hadikusumo sama sekali tidak ada dasarnya. Pemikiran (pemikiran sekular) ini tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam. Islam menjamin

²² Moh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, I-III (Jakarta: Jajasan Prapanca. 1959), p. 115.

membangun pemerintahan yang adil dan menegakkan keadilan berdasarkan kerakyatan dan musyawarah serta kebebasan memeluk agama. Merujuk pada nash Al Quran, Ki Bagus Hadikusumo menyebutkan tiga prinsip penting yaitu keadilan, musyawarah, dan kebebasan beragama.²³

Tiga prinsip itu merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam Islam dan juga dalam sistem demokrasi. Dengan ketiga prinsip tersebut maka Ki Bagus Hadikusumo berkeyakinan bahwa Islam sesungguhnya bisa jadi bagian atau sumber yang sangat penting bagi demokrasi dan bahkan bagi pembentukan dan peyelenggaraan negara/pemerintahan modern. Arah pandangan dan argumentasi Ki Bagus Hadikusumo tentang Islam dan Negara sangat jelas terlihat saat perdebatan konstitusi. Ki Bagus Hadikusumo mengajukan Islam sebagai dasar negara dengan beberapa alasan:

1. *Alasan Normatif.* Ki Bagus Hadikusumo mengemukakan beberapa ayat Al Quran yang menegaskan bahwa Islam sebagai *Rahmatan lil*

²³ Ki Bagoes Hadikoesoemo, *Islam Sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin*. (Yogyakarta: Pustaka Rahayu. 1954), p. 15.

„*alamin*, memberi kan landasan atau prinsip-prinsip moral yang sangat kuat bagi masyarakat dan negara. Hukum Islam dibangun untuk kemaslahatan umum (*maslahah „ammah*) bukan kemaslahatan umat Islam saja karena Islam memang agama yang *rahmatan lil“alamin*.

2. *Alasan Historis*. Para Nabi dan Rosul telah berhasil menegakkan masyarakat yang didasarkan pada hukum agama. Bahkan sejarah dan peradaban Islam yang panjang sejak 1400 tahun, telah membuktikan keagungan ajaran dan hukum Islam dalam membangun masyarakat di berbagai wilayah dunia. Jika dijumpai ada eksepsi (Sultan Sulaiman di Turki misalnya) itu lebih dikarenakan pengaruh tipu muslihat politik imperialisme Barat yang memang tidak pernah menunjukkan niat baik terhadap Islam dan umat Islam di wilayah jajahannya, termasuk di Indonesia. di Indonesia sendiri sudah enam abad sebelum Belanda menjajah Hukum Islam sudah

berjalan. Bahkan karena dorongan iman, orang-orang Islam telah berjuang membela tanah air dari Belanda. Perjuangan orang Islam sejak awal telah menjadi bagian yang sangat penting dalam pembentukan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa.²⁴

3. *Alasan Sosiologis*. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan Islam telah berakar dan besar berpengaruh terhadap tradisi masyarakat Indonesia. tidak berlebihan untuk dikatakan bahwa masyarakat Indonesia telah pada hakikatnya adalah masyarakat religius dan Islam telah menjadi bagian penting dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat dan bangsa Indonesia. Bahkan pengaruh Islam sangat terasa di banyak sektor, antara lain: lembaga pendidikan, intelektual, berbagai upacara dan tradisi, seni, sistem hukum dan lain-lain. Karena itu Ki Bagus Hadikusumo mengungkapkan pandangannya bahwa Islam itu “sesuai dengan keadaan jiwa rakyat yang

²⁴ Ki Bagoes Hadikoesoemo, *Islam Sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin*. (Yogyakarta: Pustaka Rahayu. 1954), p. 18.

terbanyak... janganlah hendaknya jiwa yang 90% dari rakyat itu diabaikan saja tidak diperdulikan.”²⁵

4. *Alasan Psikologis*. Dengan beberapa pertimbangan Ki Bagus Hadikusumo mengingatkan kepada seluruh anggota sidang BPUPKI:

“Apabila negara Indonesia tidak berdiri di atas agama Islam, kalau-kalau umat Islam yang terbanyak itu nanti bersikap passif atau dingin tidak bersemangat.” Ki Bagus Hadikusumo memang sangat mengkhawatirkan aspirasi Islam ini tidak diterima, kekecewaan umat akan bertambah besar apalagi keputusan sidang Komite Perbaikan Peradilan Agama tentang pemberlakuan hukum Islam pada masa penjajahan Belanda juga dianulir oleh pemerintah Belanda. Tentu ini sebuah penghianatan dan sangat mengecewakan umat Islam.²⁶

²⁵ Ki Bagoes Hadikoesoemo, *Islam Sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin*. (Yogyakarta: Pustaka Rahayu. 1954), p. 23.

²⁶ Lukman hakiem, *Dari Muhammadiyah Untuk Indonesia: Pemikiran dan Kiprah Ki Bagoes hadikoesoemo, Mr. Kasman Singodimejo, dan K. H. Abdul Kahar Muzakkir* (Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013), p. 69-71.

Didorong keyakinannya terhadap Islam yang antara lain mengajarkan persatuan berdasarkan persaudaraan yang kokoh, maka Ki Bagus Hadikusumo menganjurkan agar negara dibangun atas dasar ajaran Islam. Bagi Ki Bagus Hadikusumo Islam yang diusulkannya menjadi dasar negara itu, paling sedikit mengandung nilai-nilai yang:

1. Mengajarkan persatuan atas dasar persaudaraan yang kukuh
2. Mementingkan perekonomian dan mengatur pertahanan negara
3. Membangun pemerintahan yang adil dan menegakkan keadilan
4. Tidak bertentangan, bahkan sangat sesuai dengan kebangsaan kita,
5. Membentuk potensi kebangsaan lahir dan batin serta menabur semangat kemerdekaan yang menyala-nyala.

Ki Bagus Hadikusumo memberikan delapan (8) kriteria seorang pemimpin. Pertama, seorang pemimpin haruslah memiliki sifat istiqomah. Istiqomah menurut beliau berarti lurus,

teguh dan bersungguh-sungguh. Lurus maksudnya tidak miring dan tidak berbelok. Teguh berarti sikap tak berubah pendirian. Dan bersungguh-sungguh berarti yakin dan setia. Ki Bagus Hadikusumo menegaskan:²⁷

“Dalam i‘tiqad (kepercayaan), pembicaraan dan tindakan dengan pendirian yang teguh serta bersedia membela kebenaran itu dengan setia.”

kemudian mengutip surat Hud ayat 112 dan As-Syura ayat 15.

Sikap *istiqomah* ini hanya bisa didapat jika pemimpin tersebut tawakkal pada Allah. Menurut Ki Bagus Hadikusumo,

“Orang yang tidak bertawakkal kepada Allah hati dan ketegouhan, menjadi penakut dan senantiasa merasa kuatir ragu. Kalaupun ia berani, maka keberaniannya iu tidak teuh dan lekas berubah menjadi ketakutan dan kecemasan.”

Yang kedua adalah Tawakkal. Ki Bagus Hadikusumo menekankan pentingnya tawakkal bagi seorang pemimpin.

²⁷ Lihat, Ki Bagoes Hadikoesoemo, *Islam Sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin*. (Yogyakarta: Pustaka Rahayu. 1954).

“Orang yang sengaja beramal kebaikan membela agama dan kebenaran sangat sering digoda oleh syaitan-iblis (yang selalu menampakkan dirinya berupa kesenangan dunia), sehingga ia merasa takut dan kuatir berkurang penghasilannya, mundur perusahaannya, atau susut hartabendanya; atau kehilangan pangkat dan jabatannya, atau kuatir tak mendapat rezeki. Ketahuilah, disini orang harus mempunyai tawakkal itu untuk mengalahkan godaan syaitan tersebut diatas.”

Yang ketiga, Ki Bagus Hadikusumo mengutip Surat Al Hijr ayat 18, Ki Bagus Hadikusumo menyebutkan pentingnya bermuhasabah. Karena yang paling berbahaya adalah hawa nafsu yang bersembunyi dalam diri manusia.

Yang keempat adalah adil dan jujur. Adil berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan jujur berarti lurus.

Yang kelima adalah tawadlu dan tidak takabur. Takabur artinya sombong. Termasuk sombong (tidak suka) untuk menerima kebenaran dari orang lain karena perasaan angkuhnya. Ki Bagus Hadikusumo menyebutkan Surat Luqman ayat 18 sebagai peringatan

Allah untuk tidak berlaku angkuh dan sombong. Sifat sombong dan ujub menurut Ki Bagus Hadikusumo menghilangkan kehati-hatian dan kewaspadaan. Inilah yang menjadi pangkal kekalahan dan kejatuhan.²⁸

Yang keenam adalah pemimpin juga harus memegang teguh janji. Poin ini menjadi poin penting setelah tawadlu. Ki Bagus Hadikusumo mengingatkan,

janjii tidak boleh disalahi terutama oleh para pemimpin, karena namanya akan luntur hilang kehormatan dirinya, dan pemimpinya tak akan dihargai orang. janganlah boros dengan janji dan kesangupan, janganlah berjanji kalau tidak yakin dapat menetapi. Menyalahi janji adalah dosa besar dan menetapi janji adalah satu kewajiban.”

Yang ketujuh adalah sabar dan halim. Sabar bukan hanya menerima kekecewaan dengan tenang, tetapi juga lebih luas, yaitu;

“Tahan dan kuat hatinya, teliti, tenang dan berani. Bersabar ialah menahan kemarahan hawanafsu dan menahan keinginan nafsu yang jahat, sehingga nafsu itu dapat dikendalikan dan diatur dengan teliti dan utama”²⁹

²⁸ Lihat, Ki Bagoes Hadikoesoemo, *Islam Sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin*. (Yogyakarta: Pustaka Rahayu. 1954).

²⁹ Lihat, Ki Bagoes Hadikoesoemo, *Islam Sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin*. (Yogyakarta: Pustaka Rahayu. 1954).

Sifat halim menurut Ki Bagus Hadikusumo adalah lembut hati dan peramah, tidak lekas marah dan pemaaf. Sifat seperti ini akan menarik hati, perhatian dan kecintaan pengikutnya dan masyarakat.

Terakhir Ki Bagus Hadikusumo menyebutkan, hidup sederhana sebagai sifat seorang pemimpin. Pemimpin harus menghindari sifat kikir dan boros. Sebaliknya dapat hidup hemat dan dermawan. Hidup sederhana justru akan memberikan kehormatan bagi pemimpin tersebut. Ki Bagus Hadikusumo berpesan,

“Kalau engkau hendak mencari pemimpin sejati ichlas lahir-batin, perhatikanlah terlebih dahulu dapur rumahnya dan cara hidupnya sebelum memperhatikan dia dari segi-segi lainnya. jika engkau lihat dapurnya penuh santapan yang enak-enak dan cara hidupnya mewah, hentikan penyelidikanmu karena sudah terang dia bukan pemimpin sejati. Sebab seorang pemimpin sejati tidak mungkin suka hidup mewah. Bahkan pemimpin jang mengatakan bahwa kemegahan dan kemewahan itu perlu untuk menjaga standing bangsa dan negara kita dimata dunia internasional : tetapi perkataan itu nyatanya alasan jang dibuat-buat, sebab dirumah tangganya jang terpisah dari dunia internasional, namun mereka suka mewah dan megah juga. jarang orang yang berani hidup melarat ketika

ada kesempatan baginya menjadi kaya baik secara halal atau tidak halal, yang berani hanyalah pemimpin-pemimpin sejati dan muchlis serta orang2 yang saleh, karena mereka sedia rela melepaskan keduniaan itu asal dapat bekerja dan berjuang untuk keselamatan dan kebahagiaan umat.”

Ki Bagus Hadikusumo kemudian melanjutkan,³⁰

“Tidak kurang pemimpin yang dahulu disebut muchlis, tetapi setelah terbuka kesempatan untuk mewah maka diambilnya kesempatan itu dan mereka terus juga menjadi pemimpin; tetapi keichlasanya itu telah hilang, apalagi jika kesempatan itu tidak halal. Ketahuilah bahwa ukuran pemimpin tidak ditentukan oleh lamanya dia berjuang, tetapi oleh keichlasan dan kebijaksanaannya serta keberaniannya memikul tanggung jawab.”

³⁰ Lihat, Ki Bagoes Hadikoesoemo, *Islam Sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin*. (Yogyakarta: Pustaka Rahayu. 1954).